

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Putra, 2013). Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksudkan telah diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yakni upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yosefrinaldi, 2013).

Laporan keuangan adalah posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas dengan mempertanggungjawabkan aktivitasnya terhadap publik

dan juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan sebuah keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, oleh karena itu informasi keuangan yang disajikan harus mempunyai nilai supaya informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan yang mempunyai nilai dan dapat bermanfaat bagi penggunanya berarti laporan keuangan tersebut berkualitas. Salah satu aspek penting yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Widari dan Sutrisno, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus berjalan kurang optimal. Dari total anggaran sebesar Rp. 2,174 triliun untuk kegiatan pembiayaan di OPD, serapannya hanya mencapai Rp. 1,926 triliun atau 89,28 %. APBD 2018 terbagi atas Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1,147 triliun dan pos

BelanjaLangsung (BL) Rp. 1 triliun. Untuk penyerapan anggaran BTL terealisasi Rp.1,084 triliun (94,53%), sedangkan pos BL terpenuhi Rp. 841,63 miliar (84,12%). Belum optimalnya penyerapan karena perencanaan dari awal kurang siap serta pengawasan *progres* awal kegiatan tidak terpantau dengan baik. Untuk memaksimalkan serapan anggaran, sebelumnya telah dilakukan tim evaluasi penyerapan realisasi anggaran yang melibatkan Asisten I (Bidang Pemerintahan, Asisten II (Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat), dan Asisten III (Bidang Administrasi) dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan identifikasi persoalan yang dihadapi OPD serta mencari solusi (www.krjogja.com).

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor pertama adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan (Wardani dan Andiryani, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta, dkk (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh

positif antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda diungkapkan oleh Erawati dan Abdulhadi (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kapasitas sumber daya manusia. Tuasikal (2007) menjelaskan bahwa untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Kiranayanti dan Erawati (2015) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini senada dengan pernyataan Harmoni (2016) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan sasaran dan tujuan yang kemudian membuat suatu rencana kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut (Defitri, 2018). Dalam mewujudkan tujuan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel (Megawati, dkk, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moha, dkk (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Moha, dkk (2017) juga didukung oleh peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Defitri (2018) yang berhasil membuktikan adanya hubungan positif signifikan antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah regulasi. Regulasi adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat atau sebuah Negara (Kurniawan, 2008, p.1). Regulasi yang memadai juga akan berdampak positif terhadap efektifitas penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Dengan penerapan regulasi yang benar terhadap penyajian laporan keuangan maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat/publik akan terealisasi secara akurat. Untuk itu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap peraturan-peraturan dalam hal penyajian laporan keuangan haruslah di update secara berkala, agar kesalahan dalam penyajian laporan keuangan tidak terjadi lagi sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efektif (Pamungkas, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2016) adanya pengaruh antara regulasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah faktor

utama untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Maritin (1999) dalam Artika (2016) teknologi informasi adalah teknologi yang mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi dan teknologi yang tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat lunak dan perangkat keras) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan sebuah informasi. Suatu teknologi informasi terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan manajemen data. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam suatu organisasi dalam hal pelaporan keuangan sehingga dapat lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan (Widjajanto, 2001:89). Erawati dan Abdulhadi (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Artika (2016) dan Maksyur (2015) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Erawati dan Abdulhadi (2018). Ada dua perbedaan dari penelitian ini, pertama variabel yang digunakan Erawati dan Abdulhadi (2018) yaitu Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan pembeda dari penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel prinsip pengelolaan keuangan daerah dan regulasi. Perbedaan kedua, objek penelitian Erawati dan Abdulhadi (2018) dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota

Yogyakarta, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada OPD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan dari hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus”**.

1.2. Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang yang telah dibahas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mengambil objek pada Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kuantitatif dengan metode kuesioner.
3. Variabel dependen penelitian yaitu kualitas laporan keuangan
4. Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, prinsip pengelolaan keuangan daerah, regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Kudus?
3. Apakah prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Kudus?
4. Apakah regulasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Melihat uraian dari latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.

2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh positif regulasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.
5. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan menganalisis seberapa baik laporan keuangan itu bisa dikatakan berkualitas. Dan untuk

terus meningkatkan pengelolaan laporan keuangan daerahnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk mengembangkan serta bahan masukan pada peneliti selanjutnya di bidang yang sama.

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan referensi bagi para akuntan sektor publik di Kabupaten Kudus untuk memahami prinsip pengelolaan keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia yang akan diterapkan terhadap kualitas laporan keuangan.

